



RENCANA KERJA TAHUN 2022



**KECAMATAN KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2022. Rencana Kerja ini suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Tahun 2022.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Kemlagi. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

CAMAT KEMLAGI



TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19681016 199003 1 007



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kec. Kemlagi.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III Tujuan dan Sasaran	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	36
BAB V Penutup	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Kemlagi merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

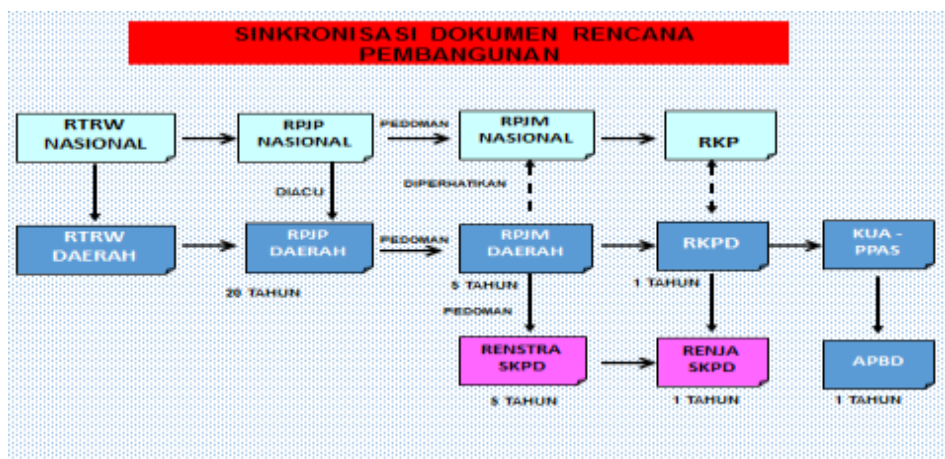
Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Kemlagi yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Kemlagi adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Kemlagi.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

25. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
26. SK Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Kemlagi Nomor 188.45 / 28 / 416-315 / 2021

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Kemlagi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Kemlagi ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Kemlagi pada tahun 2020 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Realisasi belanja pada Kecamatan Kemlagi Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
			(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.363.909	27.855.217	61%	17.508.692
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.700.000	1.419.100	83%	280.900
	Penyediaan alat tulis kantor	20.613.100	20.613.100	100%	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.000.000	9.000.000	100%	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.517.370	9.497.000	99,8%	20.370
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94.034.750	93.650.000	99,6%	384.750
	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	24.510.000	98%	490.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	28.825.000	28.825.000	100%	0
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	26.808.960	26.808.960	100%	0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100%	0
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.947.800	20.838.912	99,5%	108.888
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	4.850.000	97%	150.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	11.772.000	11.772.000	100%	0
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan				
	Penunjang PATEN	33.590.000	33.590.000	100%	0
	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	10.925.000	9.915.000	90,8%	1.010.000
	Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan	17.012.500	15.812.500	93%	1.200.000
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	163.665.250	155.517.125	95%	8.148.125
	Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat	68.337.500	61.837.500	90,5%	6.500.000
	JUMLAH	602.113.139	566.311.414	94,05%	35.801.725

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kemlagi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi target Kinerja hasil program dan keluar Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4.01	Bidang Administrasi Pemerintahan									
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran								
01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan		41,399,726	45,000,000	33,902,968	75%	45,363,909		
1.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan bermotor yang dapat terbayar		1,584,100	1,700,000	1,600,000	94%	1,700,000		
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll		19,299,700	21,326,400	21,326,400	100%	20,613,100		

01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi		6,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	9,000,000		
01.12	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan			8,000,000	8,000,000	100%	9,517,370.25		
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll		160,007,000	52,470,000	52,012,000	99%	94,034,750		
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan		14,999,000	83,000,000	82,775,000	99%	25,000,000		
01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan		49,925,000	26,500,000	26,500,000	100%	28,825,000		
01.23	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan		24,960,000	26,808,960	26,808,960	100%	26,808,960		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi								
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik			5,000,000	5,000,000	100%	10,000,000		

02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas		24,092,000	22,285,000	22,285,000	100%	20,947,800		
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik		12,395,000	6,000,000	5,943,400	99%	5,000,000		
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-								
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya		8,760,000	10,000,000	9,919,000	99%			
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-								
06.05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketemtuan yang berlaku dan tepat waktu		7,493,500	10,000,000	10,000,000	100%	11,772,000		
	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan			36,385,000						
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan									
	Penunjang PATEN			29,975,000	38,150,000	38,150,000	100%	33,590,000		
	Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan			39,750,000	36,000,000	35,500,000	99%	10,925,000		
	Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan				31,500,000	31,000,000	98%	17,012,500		

	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat			30,000,000	33,300,000	33,000,000	99%	163,665,250		
	Fasiltasi penyelenggaraan pemerintahan desa									
	Fasiltasi penyelenggaraan pembangunan desa									
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan									
	Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat				53,100,000	51,700,000	97%	68,337,500		
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								1,161,670,282	34,2%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	9,164,060						4,373,650	47,73%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	13,168,275						5,580,700	42,38%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,023,389,198	33,38%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,962,949,178						1,018,674,098	33,37%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	13,106,600						4,715,100	35,98%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0	0%

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	12,000,000						0	0%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah penyediaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yg dpt terlaksana								
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bimbingan teknis yang dapat terlaksana								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								83,266,900	45,55%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,000,000						4,284,750	53,56%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	218,000,000						27,890,810	41,02%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	47,609,041						22,414,000	47,08%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	9,000,000						5,112,800	56,81%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan								
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	32,200,000						14,064,540	43,68%

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18,000,000						9,500,000	52,78%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	390,000,000							
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								25,791,734	35,71%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,228,778						12,387,254	27,39%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	27,000,000						13,404,480	49,65%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19,268,100	43,16%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	24,647,800						13,748,350	55,78%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	12,000,000						1,654,550	13,79%

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	8,000,000						3,865,200	48,23%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								14,753,500	45,36%
7.01.01.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								14,753,500	45,36%
7.01.01.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dg Pelayanan Perizinan Non Usaha		10,058,680						5,832,250	57,98%
7.01.01.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	22,470,150						8,921,250	39,70%
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan								15,983,250	18,10%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15,983,250	18,10%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	49,991,853						5,142,000	11,18%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	42,305,348						10,841,250	25,63%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								26,000,200	34,21%

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								26,000,200	34,21%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	52,000,000						17,595,400	33,84%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24,000,000						8,404,800	35,02%
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah								18,477,100	51,56%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa								18,477,100	51,56%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	6,135,490						3,637,400	59,28%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,556,060						5,269,100	49,92%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,620,475						671,000	41,41%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8,649,750						5,383,650	62,24%

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8,875,000						3,515,950	39,62%
			4,082,736,538	481,975,026	515,140,360	500,422,728	97%	602,113,139	1,236,884,332	34,1%

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	
			TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kecamatan	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut :

T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi

Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan			79%				79%				Baik
2	Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai SP			79%				80%				Baik
3	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Dalam Satu Tahun, Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat			80%	81%			80%				Baik
4	Presentase Indikator Indikator Program Perangkat Daerah			80%	81%	82%	83%	94,05%	81%	82%	97%	Baik

	yang tercapai											
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			80	80,92	81,6	82,32	80,22	80,92	81,6	82,32	Sangat Baik
6	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			n/a	80%	81%	82%	n/a	80%	81%	82%	Baik
7	Presentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti			n/a	n/a	81%	82%	n/a	80%	81%	82%	Baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Kemlagi diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kemlagi

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Kemlagi bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Kemlagi yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Kemlagi;

- Faktor Kelemahan Organisasi
 - 1) Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
 - 2) Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai; .

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kemlagi namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
 1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
 2. Tingginya peluang pasar.
 3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
 4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan
- Faktor Tantangan Organisasi
 1. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
 2. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
 3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 4. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
 5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Kemlagi yang heterogen maka ini

merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Kemlagi untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kemlagi Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kemlagi Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31.
 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022
 Provinsi/Kabupaten/Kota Mojokerto

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEMLAGI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,62	3,465,791,658	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEMLAGI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,62	3,465,791,658	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	91%	16,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	91%	16,500,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	3,068,585,178	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	3,068,585,178	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	59,30	15,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	59,45	15,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	91%	213,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	91%	213,000,000	

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	86%	63,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	86%	63,000,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kendaraan	35,058,680	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kendaraan	35,058,680	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN KEMLAGI	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	86%	54,647,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN KEMLAGI	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	86%	54,647,800	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35,058,680	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35,058,680	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	700	35,058,680	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	700	35,058,680	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam setahun bidang Pemerintahan Desa	85%	300,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam setahun bidang Pemerintahan Desa	85%	300,000,000	

1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan, Pengawasan dan Pembangunan Daerah	52 Fasilitasi	300,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan, Pengawasan dan Pembangunan Daerah	52 Fasilitasi	300,000,000	
					3,800,850,338					3,800,850,338	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada di kecamatan Kemlagi melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Kemlagi secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32

**Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto**

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 ekor hewan qurban idul adha	Hibah Sapi untuk 1 desa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kemlagi ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

3.4 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 6. Penyediaan Bahan / Material 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
C.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kemlagi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	KECAMATAN KEMLAGI	81,62	3,465,791,658	APBD		82,32	3,456,385,178
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		90%	16,500,000			91%	17,500,000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%	3,068,585,178			92%	3,069,935,178
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		58,30	15,000,000			59,30	8,000,000

7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	KECAMATAN KEMLAGI	91%	213,000,000	APBD		92%	189,450,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Kendaraan R2	35,058,680			2 Kendaraan R2	51,000,000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		86%	63,000,000			87%	64,000,000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		86%	54,647,800			87%	56,500,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal		81%	35,058,680			82%	27,300,00
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal		700	35,058,680			715	27,300,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan pemerintah desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan		85%	300,000,000			86%	300,000,000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		52 Fasilitasi	300,000,000			52 Fasilitasi	300,000,000
					3,800,850,338				3,783,685,178

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Usulan Program Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja tahun 2022 Kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut :

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 disajikan pada table berikut :

TC-27
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KECAMATAN KEMLAGI

OPD : KECAMATAN KEMLAGI

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2022	PAGU PRAKIRAA N MAJU TAHUN 2023 (Rp.)	SUMBER DANA	KET.
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kec. Kemlangi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,92					3,465,791,658	3,456,385,178	APBD	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Persentase indikator program perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	91%	16,500,000	17,500,000		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen			9,000,000	10,000,000		
	7.01.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	8 dokumen			6,000,000	7,500,000		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	28 dokumen	3,052,585,178	3,052,585,178									
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	12 lap	16,000,000	17,350,000									

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							IP ASN Perangkat Daerah	58,30	15,000,000	8,000,000		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	20 stel		15,000,000	8,000,000		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	91%	213,000,000	189,450,000		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor						Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket		15,000,000	8,000,000		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket		78,000,000	85,000,000		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan		30,000,000	25,000,000		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan						Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	2 paket		12,000,000	10,250,000		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 paket		9,000,000	4,500,000		
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket		27,000,000	30,000,000		

	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan			26,000,000	26,500,000		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	86%	35,058,680	51,000,000		
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 kendaraan R2	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 kendaraan R2	35,058,680	51,000,000		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	86%	63,000,000	64,000,000		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			35,000,000	36,000,000		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	2 thl			28,000,000	28,000,000		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	86%	54,647,800	56,500,000		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan						Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	1 Unit			34,647,800	35,000,000		

	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya						Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	4 Unit			12,000,000	13,000,000		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya						Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket			8,000,000	8,500,000		
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%					35,058,680	27,300,000		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								Jumlah Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		35,058,680	27,300,000		
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	700 pelayanan		715 pelayanan	35,058,680	27,300,000		
	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah				Persentase hasil koor dinasi yang ditindak lanjuti	85%					300,000,000	300,000,000		

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan , ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	52 Fasilitasi	300,000,000	300,000,000		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Fasilitasi		10 Fasilitasi	45,000,000	45,000,000		
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Fasilitasi		8 Fasilitasi	14,000,000	14,000,000		
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Fasilitasi		10 Fasilitasi	76,000,000	76,000,000		
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitasi		24 Fasilitasi	165,000,000	165,000,000		
												3,800,850,338	3,783,685,178		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto “***Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia***” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kemlagi. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kemlagi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kemlagi berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.
 - b. Kecamatan Kemlagi berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kemlagi. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Kemlagi juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Kemlagi ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Kemlagi serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021
CAMAT KEMLAGI



TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos.MM
Pembina
NIP. 19681016 199303 1 007



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".